GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan **Tgl/Bln/Thn : 11 Desember 2007**

Subyek : UNFCCC **Hari : Selasa**

Halaman : 01

Skema Dana Adaptasi Disetujui

[NUSA DUA] Skema dana adaptasi (*adaptation fund*) akhirnya disetujui di level *senior official meeting*, Senin (10/12) malam. Penetapan hasil negosiasi ini tinggal menunggu pengesahan di tingkat pertemuan tingkat tinggi (*high level meeting*). Hal itu disampaikan Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kerja Sama Internasional, Mahendra Siregar, sebelum pembukaan pertemuan menteri-menteri keuangan di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/12).

Menurut Mahendra, dengan semangat negosiasi yang berkembang pada Pertemuan Bali, dia yakin bisa dibentuk lembaga untuk mengelola dana adaptasi. "Untuk sekretariatnya tetap ditunjuk GEF (Global Environment Fund, Red)," ujarnya.

Sebelumnya, negara-negara berkembang khusus kelompok negara G 77 menolak keberadaan GEF untuk mengelola dana adaptasi karena lembaga itu dinilai terlalu ketat dalam persyaratan untuk memperoleh dana adaptasi.

Mengenai jumlah dana yang diterima, Mahendra mengatakan masih belum ada perubahan, yakni sekitar 2 persen dari dana *clean development mechanism* (CDM).

Lebih Aktif

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri-menteri keuangan memainkan peran lebih aktif dalam merespons perubahan iklim, baik secara domestik maupun internasional. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka pertemuan tingkat tinggi antarmenteri keuangan yang merupakan *side event* Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/12).

Menurut Presiden, menteri-menteri keuangan dan para pelaku pasar dapat membantu membuat suatu keputusan mengenai prioritas anggaran keuangan yang lebih strategis. "Peran menteri keuangan sangat penting karena dapat mengelola peningkatan investasi dan mengeluarkan kebijakan serta meningkatkan gairah pasar modal," ujarnya.

Presiden mengatakan, menteri keuangan juga harus memiliki pemikiran yang panjang mengenai isu-isu adaptasi melalui penciptaan pasar, insentif, investasi, guna mengakomodasi kepentingan ekonomi dan masyarakat.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Secara terpisah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang juga menjabat Ketua Delegasi Indonesia dalam Forum Pertemuan Tingkat Tinggi antar-Menteri Keuangan dan Lembaga Keuangan serta Nonkeuangan menjelaskan Indonesia akan mengajukan instrumen kebijakan nasional terkait kerangka perubahan iklim. Nantinya, Indonesia juga akan mengusulkan pembahasan instrumen kebijakan fiskal terkait dampak perubahan iklim. [E-7/L-10]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP